

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Balai KIPM Tanjungpinang Semester I TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Semester I TA 2025 dengan Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara periode TA 2025 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.0,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025 . Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- terdapat perubahan pada nilai Kewajiban dan Ekuitas Pada Semester I Tahun 2025

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.0,- tidak terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas tidak mengalami Defisit-LO sebesar 0-.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.780.452.193,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (26.176.050),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (2.780.452.193),- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 0,-

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

### **I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KANTOR BPPMHKP TANJUNGPINANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE SEMESTER I YANG BERAKHIR  
30 JUNI 2025 DAN DESEMBER 2024**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	% LIQU ANGG	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	750,000,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	-	<b>750,000,000</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	2,172,726,000
Belanja Barang	B.4	-	-	-	2,389,914,000
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		-	-	-	<b>4,562,640,000</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**II. NERACA**

**KANTOR BALAI KIPM TANJUNGPINANG  
NERACA SEMESTER I  
PER 30 JUNI 2025 DAN DESEMBER 2024**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan G	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	41,464,670
Jumlah Aset Lancar		-	41,464,670
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	1,194,216,000
Peralatan dan Mesin	C.15	-	3,952,509,823
Gedung dan Bangunan	C.16	-	1,628,226,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	10,462,900
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	36,440,300
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	(4,003,910,935)
Jumlah Aset Tetap		-	2,859,408,758
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	<b>2,859,408,758</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	-	2,859,408,758
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	<b>2,859,408,758</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	<b>2,859,408,758</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR BALAI KIPM TANJUNGPINANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE SEMESTER I YANG BERAKHIR  
30 JUNI 2025 DAN DESEMBER 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2025	2024
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	2,780,452,193	11,903,233,137
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(26,176,050)	(2,343,840,344)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(2,754,276,143)	(1,934,347,501)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2,780,452,193)	(409,492,843)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	-	<b>7,215,552,449</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor BPPMHKP Tanjungpinang**

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Kantor Balai KIPM Tanjungpinang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan cara penerapan sistem Manajemen Mutu.

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai KIPM Tanjungpinang. Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.25A Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang

- dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan infasive, serta benda lain;
  - d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertenu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
  - f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
  - g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
  - h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
  - i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
  - j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati Ikan;
  - k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;

- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Institusi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan di lini terdepan sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumber daya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan ikan, mutu Dan keamanan hasil perikanan.

Arah pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan adalah untuk meningkatkan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Balai KIPM Tanjungpinang sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi Balai KIPM Tanjungpinang terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Kelompok Fungsional Tata Usaha;
- b. Sub Koordinator Kelompok Fungsional Tata Pelayanan;
- c. Sub Koordinator Kelompok Fungsional Pengawasan, Pengendalian dan Informasi;
- d. Kelompok jabatan fungsional

Balai KIPM Tanjungpinang sebagai UPT BKIPM, menetapkan visi mengacu kepada visi BKIPM dalam kegiatan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, yaitu “Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman terpercaya“

Sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi tersebut Balai KIPM Tanjungpinang menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan;
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Jenis Agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi;

3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang memiliki Sumber Daya Manusia 30 Pegawai ASN yang memiliki beberapa latar belakang pendidikan, diantara nya:

- 1 Orang lulusan Pasca Sarjana
- 3 Orang lulusan Sarjana
- 3 Orang lulusan Diploma 3
- 3 Orang lulusan SMA/SLTA Sederajat
- 1 P3K lulusan Sarjana

Tidak terdapat penambahan dan pengurangan pegawai pada balai KIPM Tanjungpinang di tahun 2024.

Sedangkan 21 Orang Pegawai Honor terdiri dari:

- 3 Orang Pramubakti
- 8 Orang Bagian Administrasi
- 10 Orang bagian Satpam / Supir
- 

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh

## *Keuangan*

Kantor Balai KIPM Tanjungpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## *Basis*

### *Akuntansi*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

BPPMHKP Tanjungpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Tanjungpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor BPPMHKP Tanjungpinang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai KIPM Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
  
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - ❖ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- ❖ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ❖ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset*

**e. Aset Lainnya**

### *Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit	10

Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

(1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

(2) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

*Realisasi*

**B.1 Pendapatan**

*Pendapatan*

*Rp.0,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,- tidak terdapat Pendapatan Kantor BPPMHKP Tanjungpinang yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya serta serta Pendapatan

Anggaran Lain – lain sebesar Rp. 0,- rincian sebagaiberikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	#DIV/0!

Pendapatan Jasa terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pendapatan Jasa Karantina Perikanan, akun 425332) mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 senilai Rp. 0,- .

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Jasa TA 2025. Hal ini disebabkan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi pada lingkup BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	731,069,775	-100.00
Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
<b>Jumlah</b>	-	<b>731,069,775</b>	<b>-100.00</b>

Realisasi

## B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp.0,

Realisasi Belanja instansi pada Periode Tahunan TA 2025 adalah sebesar Rp.0,- atau 0% .

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya revisi anggaran yang yang terdampai UPT yang terlikuidasi dan tidak adanya belanja modal pada Tahun Anggaran 2024.

### *Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	1,360,764,485	(100.00)
Belanja Barang	-	957,318,016	(100.00)
Belanja Modal	-	-	#VALUE!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>2,318,082,501</b>	<b>(100.00)</b>

### **B.3 Belanja Pegawai**

*Belanja  
Pegawai Rp0,-*

Realisasi Belanja Pegawai pada Periode Tahunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0- dan Rp3.122.940.000,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pada Periode Tahunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 5 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan UPT BPPMHKP Tanjungpinang mejadi anak satker dari BPPMHKP Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

#### *Perbandingan Belanja Pegawai Periode TA 2025 dan 2024*

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI TA 2025</b>	<b>REALISASI TA 2024</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	2,289,119,749	(100.00)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	1,695,447,164	(100.00)
Belanja Lembur	-	279,315,000	(100.00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>4,263,881,913</b>	<b>(100.00)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>4,263,881,913</b>	<b>(100.00)</b>

#### **B.4 Belanja Barang**

*Belanja  
Barang Rp.0,-*

Realisasi Belanja Barang Periode Tahunan TA 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.957.318.016,-. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini antara lain disebabkan UPT BPPMHKP Tanjungpinang mejadi anak satker dari BPPMHKP Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

*Belanja Modal  
Rp.0,-*

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal pada periode TA 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- , tidak terdapat belanja modal pada Periode Tahun 2025. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak ada kenaikan atau penurunan pada belanja modal Semester I TA 2025 dan 2024

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah pada periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode TA 2025 adalah sebesar Rp0,.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode Tahunan TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal TA 2024 Tidak mengalami belanja modal

pekerjaan Gedung Pelayanan kantor BPPMHKP Tanjungpinang.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Periode TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024
Perencanaan dan Pengawasan Gedung	0	0
Pembangunan Gedung dan Bangunan	0	0
Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun)
Belanja Air Baku	0	0	0.00
Jaringan Listrik	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Pada Periode TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,-.

Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp0

## **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada periode tahunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.0,-

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- dan TA 2024 adalah Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024*

<b>Keterangan</b>	<b>TH 2025</b>	<b>TH 2024</b>
Bank BNI No.acc 0186167739	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di  
Bendahara  
PenerimaanRp0

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan

Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Daftar PNBPN disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
Bank -	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,-*

**C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas  
Periode TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Piutang PNB

Rp0

#### C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

##### Rincian Piutang PNB TA 2025 dan 2024

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar

Tagihan

TP/TGR

Rp0

#### C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

##### Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	Jacobus	-	-
2	Martiana	-	-
3	Gerard	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*TPA*

*Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2025 dan 2024*

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	Yohana	-	-
2	Patrik	-	-
3	Armando	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan*

*Piutang Tak*

*Tertagih –*

*Piutang Lancar*

*Rp0*

**C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		-	-

*Belanja  
Dibayar di  
Muka Rp0*

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja dibayar di Muka TA 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Kontrak	Sisa TA 2025
1		Rp -	-
2		Rp -	-
3		Rp -	-
<b>Total</b>			-

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024*

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2025 dan 2024*

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan Rp.21.439.440,-*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan pada semester I per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.21.439.440,- dan Rp.41.464.670,- yang terdiri dari transfer masuk berupa sertifikat HC sebesar Rp.14.252.190,- dan bahan baku sebesar Rp. 7.187.250,0 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan semester I per Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024*

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	14,252,190	9,291,320
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	7,187,250	32,173,350
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>21,439,440</b>	<b>41,464,670</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan  
TP/TGR  
Rp0,-

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tidak terdapat TP/TGR pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 pada Balai KIPM Tanjungpinang.

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024*

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1	Perawatan gedung dan Bangunan	-	-
2	ATK	-	-
3	Daya Tahan Tubuh	-	-
4	Honorarium	-	-
5	Lembur	-	-
6	Eksploitasi kendaraan Roda 4	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0

**C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pada Semester I per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2025 dan 2024*

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp0*

### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang pada Semester I per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		-	-

Tanah  
Rp.0,-

### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai KIPM Tanjungpinang Semester I per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp, 0,- dan Rp.1194.216.000,- .dikarenakan adanya pengalihan aset dari KKP ke BKI pada periode TA 2024.

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah TA 2025*

No	Luas	Lokasi	Nilai
5	710 m2	Tanjungpinang Barat	1,194,216,000
<b>Jumlah</b>			<b>1,194,216,000</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp.0,-

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada semester I per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.3.952.509.823,- .

Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan Mesin berupa:

**Mutasi Tambah:**

(4) Pembelian :

*Tidak Terdapat Mutasi Tambah pada Peralatan dan Mesin pada Semester I Tahun 2025 berupa belanja meubeleer sebesar*

(5) Transfer Masuk senilai :

*Tidak ada transfer masuk.*

**Mutasi Kurang:**

*tidak terdapat mutasi kurang pada periode 30 Juni 2025.*

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp.0,-*

**C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 205 dan 2024 adalah Rp.0,- dan Rp1.628.226.000,-. Terdapat Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan sebesar (278.845.147,-) pada peride 30 Juni 2025 sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung dan Bangunan	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(278,845,147)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>(278,845,147)</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp.0,-*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp10.462.900. Terdapat Akumulasi Penyusutan pada irigasi dan Jaringan sebesar (Rp.2.922.068,-) pada periode Juni 2025. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	
Penambahan	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(2,922,068)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>(2,922,068)</b>

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp.0*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp36.440.300. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025, sebagaimana

disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp,0-*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Tidak terdapat Kontruksi Dalam Pengerjaan ( KDP ) pada Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan*

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1					
	<b>Jumlah</b>	-		-	

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.0*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Semester I per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. dan Rp.3.736.888.746,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Pada periode TA 2025*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud Rp0*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) pada Semester I TA 2025 30 Juni 2025 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Balai KIPM Tanjungpinang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2025*

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

*Aset Lain-Lain* **C.22 Aset Lain-Lain**

*Rp0*

Saldo Aset Lain-lain pada Semester I TA 2025 per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- reklasifikasi ke Aset Tetap	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-
Akumulasi Penyusutan	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp0*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka  
dari KPPN  
Rp.0,-

#### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp.0,-

#### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 sebesar Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan, terdiri dari pembayaran Listrik,air,PDAM Telepon dan Internet,dan berupa Belanja Gaji PNS dan P3K Bulan Juli serta Pembayaran Gaji PPNPN Juni Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai KIPM Tanjungpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Listrik Juni	-
2	Pembayaran Air Juni	-
3	Pembayaran Jasa/Daya Lainnya Juni	-
4	Pembayaran Telpon Juni	-
Total		-

Pendapatan  
Diterima di  
Muka

#### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp.0,- dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan 2024*

Uraian	TH 2025	TH 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ekuitas Rp .0,-

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.2.859.408.758,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNPB Rp.0,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.723.294.775,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	723,294,775	(100)
Pendapatan Lain-lain	0	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>723,294,775</b>	<b>(100)</b>

*Beban*

*Pegawai Rp.0,-*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp Rp 1.041075.892,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	0	687,026,900	(100)
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	9,521	(100)
Beban Tunj. Suami /Istri PNS	0	56,827,180	
Beban Tunj. Anak PNS	0	18,255,356	(100)
Beban Tunj. Struktural PNS	0	18,720,000	(100)
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	48,350,000	(100)
Beban Tunj. PPh PNS	0	5,131,183	(100)
Beban Tunj. Beras PNS	0	43,596,840	(100)
Beban Tunj. Uang Makan PNS	0	95,736,000	(100)
Beban Tunjangan Umum PNS	0	5,410,000	(100)
Beban Gaji Pokok PPPK	0	38,443,200	(100)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	726	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0	3,240,000	
Beban Tunjangan Beras PPPK	0	869,040	
Beban Uang Lembur	0	48,970,000	
Beban Uang Makan PPPK	0	6,549,000	
Beban Pegawai Tunangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK	0	51,568,839	
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan	0	1,041,075,892	(100)

*Beban  
Persediaan  
Rp.0,-*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp149.503.544,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	50,286,194	(100)
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	0	8,192,857	(100)
Beban persediaan suku cadang	-	3,252,300	(100)
beban persediaan bahan baku	-	99,217,350	(100)
beban pelepasan Aset	-	-	
beban Persediaan Rusak/Usang	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>160,948,701</b>	<b>(100)</b>

*Beban Barang dan Jasa Rp0*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Tidak terdapat beban barang dan jasa pada Periode Tahun Anggaran 2025 pada Balai KIPM Tanjungpinang

*Beban Pemeliharaan Rp.0,-*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 3.252.300,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya penambahan kendaraan.

*Beban Perjalanan Dinas Rp.0,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas pada periode semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 336.724.336,-. Beban tersebut merupakan

beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh pengurangan pagu perjalanan pada TA 2025 .

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Beban  
Bantuan  
Sosial Rp0

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial pada Periode Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial pada Periode  
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp0,-

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024

adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Periode TA 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	#VALUE!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#VALUE!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#VALUE!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	-	-	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	-	-	#DIV/0!

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

## Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Periode TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp0

### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Pos Luar Biasa  
Rp0

### **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp0,-.

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal  
Rp.0,-

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal Periode Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 11.903.233.137

## **E.2 Surplus (Defisit) LO**

*Defisit LO*  
*Rp(26.176.050),-*

Jumlah Defisit LO untuk periode semester I TA 2025 yang berakhir pada Periode TA 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp.26.176.050,-) dan (Rp2.343.840.344,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset*  
*Rp0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode Semester I TA 2025 yang berakhir pada Periode Semester I TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan*  
*Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Periode Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Dan Rp.7.3-9.288,-. Berupa asset sumur bor yang wujudnya sudah tiada, namun nilainya sumur bor tersebut di tambahkan kedalam nilai gedung .dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

**E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Periode Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Periode Semester I TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

*Koreksi Lain-  
Lain Rp0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode Semester I yang berakhir pada 30 Januari 2025 dan 2024 adalah

sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Kewajiban	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi  
Antar Entitas  
Rp0,-*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode Semester I TA 2025 yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. (5.038.988.579,-) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Tidak adanya Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada Periode TA 2024 hingga 30 Juni 2025.

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L

dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan Periode TA 2025 sebesar Rp.0 terdiri dari:

No	TGLBUKU	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	24 02 2020	Sertifikat KI dan Mutu	Setban	-
2	24 02 2020	Sertifikat KI dan Mutu	Setban	-
3	24 02 2020	HC Mutu kode E	Setban	-
4	24 03 2020	HC Mutu Kode B	Setban	-
5	24 03 2020	Sertifikat KI dan Mutu	Setban	-
6	14 05 2020	Sertifikat KI dan Mutu	Setban	-
<b>Jumlah</b>				-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1			-
2			-
<b>Jumlah</b>			-

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan Periode TA 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan Semeser tahun 2024 adalah Rp0.

#### **E.4.4. Ungkapan Lain - Lain-**

-











